

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aris Prio Agus Santoso Dan Mustai, In Dkk, 2021, *Hukum Keperawatan Sebuah Paradigm Kebebasan Yang Berbasis Pada Keadilan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur.2
- Hanindita, M., 2018, *Mommyclopedia Tanya Jawab tentang nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan anak*, PT Gramedia Jakarta.
- Hanindita, M., *Mommyclopedia panduan lengkap merawat bayi 0-1 Tahun*, PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building Jakarta.
- Mamuji, S dan Soekanto, S 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2019, *penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.
- Mulada, A, dan Arban., 2020, *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*, Cetakan Pertama, 1
- Musta'in dan Santoso aris, A.P., 2021, *Etika profesi*, Cetakan Ke tiga, Yogyakarta.
- Nugraheni, R 2022, *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Cetakan Pertama, Solo.
- Pasolong, H., 2021, *Etika Profesi*, Cetakan ke Tiga, Yogyakarta.
- Ruswadi Indra dan Nurohmat, 2020, *Etika Keperawatan*, adab, Cetakan Pertama, Jawa Barat.
- Wardani Ika Novita dan Sukmawati dkk. 2022. *Kebijakan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat,
- Yusmad, M.A., 2018, *Hukum diantara Hak Dan Kewajiban*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- , 2019, *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*, Kementerian Kesehatan RI Jakarta hal 53.

## Jurnal

- Affandi H, (2019). Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Antara Pengaturan Dan Realisasi Tanggungjawab Negara, *Jurnal Hukum Positum*.
- Afriya, F, (2020). Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*.
- Astute,E. K., (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*.
- Bawelo,H., Pertanggungjawaban Perdataterhadap Dokter Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pasien, *Jurnal Lex Privatum*.
- Dewi ni komang, K, R., (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Menghalangi Pemberian Asi Eksklusif, *Jurnal Analisis Hukum*.
- Iftitah, A dan Weppy, S., (2021). Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *jurnal Ilmiah Hukum*,
- Isriawaty, S, F., (2015). Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *jurnal Ilmu Hukum Legal Opinio*,
- Khuzaiyah, S dan Nurcahyo E., (2018). Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian Asi Eksklusif Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Cendikia Hukum*.
- Kristiawan, A, P., (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Novita, B dan Bedasari, H., (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun), *Jurnal Kemunting*.
- Nugroho, B, D dan Ulfah, F, I., (2022) Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab *Stunting* Di Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Nur, F,S, dan Sari, A, W., (2020) FarHubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manfaat Asi Dengan Pemberian Asi Eksklusif Kabupaten Jombang, *Jurnal Penelitian Kesehatan*.

- Jeki dan Rini,(2019). Penanggulangan stunting Di Indonesia. *Jurnal of Political Issues*.
- Roisah, H, dan Aswandi, B.,(2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Saufi,A., (2021)., Dinamika Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19, *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*.
- Singgal,A., (2017). Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Sulistyowati,E dan Dila,F., (2020). Kesadaran Hukum Ibu Terhadap Kewajiban Memberikan Asi Eksklusif Pada Bayi Di Kabupaten Sampang, *Jurnal Hukum,*
- Sumartini eka, W.,ni.,Kebijakan Pengaturan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Triwahyuningsih, S., (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia(Ham) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Legal Standing*.
- Widjaja, G dan Muslimah,R,H., (2022). Kebijakan Dan Peran Lintas Sektor Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Stunting Pada Anak Di Kota Bekasi, *Jurnal Iai Sambas*.
- Zuhra Amalia, (2019), Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata Sebuah Tinjauan Hukum, *Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5530).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5291).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 712).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 383,).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 956).

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Stunting Terintegritas Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49).

### **Internet**

<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1674548/Ucapkan-Selamat-Tahun-Baru-2023-Jokowi-Ajak-Warga-Songsong-Harapan-Dan-Peluang-Baru>

<https://Setkab.Go.Id/Inilah-Upaya-Pemerintah-Capai-Target-Prevalensi-Stunting-14-Di-Tahun-2024/>

[https://Ppid.Jemberkab.Go.Id/Berita-Ppid/Detail/Stunting-Jember-Optimis Turun](https://Ppid.Jemberkab.Go.Id/Berita-Ppid/Detail/Stunting-Jember-Optimis-Turun)

<https://Www.Kompasiana.Com/Idazaida7701/630ef63585349c2e6250dd84/Pendi-dikan-Kesehatan-Sebagai-Upaya-Awal-Penanganan-Stunting-Di-Desa-Sukogidri-Kecamatan-Ledokombo-Jember>

<https://dinkes.depok.go.id/User/DetailArtikel/asi-eksklusif-banyak-manfaatnya-apa-benar>

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/relaktasi-bisakah>

<https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/pemberian-makanan-tambahan-pmt-tahun-2022->

